JOURNAL OF ACCOUNTING
*p*- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Vol.2 Number 1 | January , 2022

# Finance With Control System Internal as Moderation Variables Effect of Fiscal Decentralization, TransparencyAnd Performance on Report Accountability

**Anasusia**
University of Muhammadiyah Makassar
Email: anasusia@gamil.com

**Article Info**

*Fiscal Decentralization, Transparency, Performance, Accountability of Financial Statements, Internal Control System.*

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, transparency and performance on the accountability of financial statements with an internal control system as a moderating variable. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Revenue Service. This research uses an associative-quantitative approach. Sampling with 47 respondents. In analyzing the data using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA) with an analytic approach. The research results of multiple linear regression analysis show that fiscal decentralization does not have a positive effect on accountability of financial statements, while transparency and performance have a positive effect on accountability of financial statements. Modersion regression analysis shows that the internal control system is a moderating variable between fiscal decentralization, transparency, and performance on accountability of financial statements.*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan transfer kekuasaan dan wewenang pengelolaan beberapa urusan pemerintah pusat ke daerah mengharuskan reformasi pengelolaan pemerintah pada berbagai aspek termasuk pengelolaan keuangan daerah (Fontanella & Rosietta, 2014:03). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah didaerahkan. Selanjutnya, amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah (Zaenuddin, 2018:132).

Desentralisasi fiskal bisa saja menyebabkan pengaruh negatif, yaitu meningkatnya korupsi dan penyelewengan penggunaan uang negara. Sehingga, akuntabilitas di instansi pemerintah daerah perlu diperkuat dan mengkaji aspek apa yang diduga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah (Mudhofar & Tahar, 2016:177).

Desentralisasi fiskal juga harus mendukung mekanisme good public governance khususnya dalam konteks pemerintah atau good governance. Beberapa tujuan utama dari peran good governance di departemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan. Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan vital dalam perekonomian negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai “kran” ekonomi, yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik dari sektor lain (Bastian, 2006:10).

Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas yaitu: “untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat

diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Kesimpulannya bahwa dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik yang signifikan (Widilestariningtyas & Permana, 2011:74-75).

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, akuntansi dan laporan keuangan mengandung arti sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengomunikasikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Kawatu, 2019:1). Salah satu alat untuk melakukan pengukuran kinerja sektor publik adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangan (Yuliani, 2018:46).

PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan Sistem Pengendalian Intern (SPI) disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah (Purbasari & Bawono, 2017:1-2). kebijakan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Prinsip demokrasi, setidaknya tidak diukir, prinsip demokrasi setidaknya harus dijalankan. Akuntabilitas publik mengharuskan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab dan manajemen (akuntabilitas dan hak manajemen).

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Kinerja Pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah pemerintah daerah yang tidak melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja pemerintah daerah di indonesia (Ananda F. P., 2018:7).

Namun ada artikel yang dipublikasikan oleh situs (koran.tempo.co) menyebutkan bahwa, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengendus tiga kasus korupsi di Kabupaten Bantaeng pada tahun anggaran 2011. Tiga kasus tersebut adalah dugaan korupsi dana bantuan sosial, dana hibah, dan dana perjalanan dinas satuan kerja perangkat daerah. Pengusutan tiga dugaan korupsi tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menandakan bahwa kemungkinan besar masih bisa terjadi tindakan korupsi terhadap SKPD yang ada walaupun daerah-daerah tertentu telah meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Suwandi, 2015:19). Manfaat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada akhirnya harus dinilai, sejauh mana kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Suacana, 2020:20). Faktor yang sangat penting dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Dengan faktor desentralisasi fiskal, suatu daerah dapat secara mandiri membiayai belanja daerah dan kegiatan pembangunan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

### 2.2 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu

prinsip dari good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Umar, Syawalina, & Khairunnisa, 2018:138).

### 2.3 Kinerja

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (sellang, Jamaluddin, & Munatsir, 2019:62).

### 2.4 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua kekuatan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2014:11-12). Struktur pengendalian internal menyediakan informasi ini dan membimbing auditor dalam perencanaan berbagai pengujian tertentu untuk menetapkan kecenderungan dan keluasan penyalah sajian laporan keuangan (Hall, 2007:195).

### 2.5 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Handayani, 2019:4-5). Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan dan sistem anggaran negara (Bastian, 20 06:76). Faktor tersebut sangat berpengaruh pada karakteristik akuntansi sektor publik.

### 2.6 Hipotesis

**a. Desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan**

Desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Purbasari & Bawono, 2017:104). Karena pertumbuhan ekonomi meningkat dengan adanya desentralisasi fiskal karena daerah telah diberi kesempatan agar membangun kemandirian untuk memperoleh pendanaan.

Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan, karena dengan kemandirian daerah yang tinggi dinilai dapat membiayai kegiatan belanja dan operasional secara mandiri, sehingga akan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik (Mudhofar & Tahar, 2016:183). Ciri utama sebuah daerah telah melksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal yaitu;

H1: Diduga Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

**b. Transparansi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Agar tercipta transparansi maka diperlukan pihak independen yang berfungsi sebagai pengawas atau pemeriksa keuangan (Sawarjuwono, 2012:313). Pada dasarnya akuntabilitas merupakan prinsip masyarakat yang transparan.

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Angrainai, 2016:1188). Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri dan (legislator, auditor, publik) dipublikasikan (Haryatmoko, 2011:112). Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal sebagai berikut;

H2: Diduga Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan

**c. Kinerja Terhadap akuntabilitas laporan keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sawarjuwono, 2012:9). Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap kemajuan pekerjaan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mulyani, et al., 2018:217). Kegiatan pengendalian ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk menetapkan standar kinerja, mengevaluasi penerapan rencana kerja, mengukur keberhasilan setiap tahapan, dan melakukan koreksi atau tindakan perbaikan bila ditemukan kekurangan atau penyimpangan terhadap rencana organisasi (Timotius, 2019:74).

Ditemukan pengaruh positif kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik, hal ini mengindikasikan, semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini yang baik (Fontanella & Rosietta, 2014:15). Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal sebagai berikut;

H3: Diduga Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan

**d. Desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan Sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada *stakeholder*, maka pemerintah perlu memiliki standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai, walaupun lingkungan akuntansi pemeritah sangat komplit, tetapi hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk dapat menerapkan sistem akuntansi (Purbasari & Bawono, 2017:104).

Sistem pengendalian internal pemerintah memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyanto, Budiman, & Fahmi, 2020:15). Untuk memperoleh tanggung jawab pelaporan keuangan, diperlukan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan proses lengkap yang terus menerus dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta keandalan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal sebagai berikut;

H4:Diduga Sistem pengendalian internal memoderasi desentralisasi fiskal atau berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

**e. Transparansi akuntabilitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi**

Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai

perusahaan (Transparansi adalah instrumen paling penting untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi faktor kunci untuk mengetahui dimensi akuntabilitas (Sanica, Ayu, & Suidarma, 2019:75).

Sistem pengendalian intern dapat menguatkan pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Interaksi sistem pengendalian intern dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (Hamsinar, 2017:125). Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal sebagai berikut;

H5: Diduga Sistem Pengendalian Internal memoderasi atau berpengaruh positif terhadap transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

**f. Kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi**

Secara sederhana, akuntabilitas publik dapat dianggap sebagai suatu proses atau mekanisme yang didalamnya pegawai atau organisasi publik dapat diberikan sangsi apabila perilaku dan atau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari definisi ini terlihat kaitan erat antara kinerja organisasi publik dengan akuntbilitas (Imbarudin, 2019:85). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan (Rai, 2008:17).

sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang memiliki tujuan membantu manajer dalam menilai capaian strategi dengan tolak ukur kinerja keuangan dan non keuangan (Purbasari & Bawono, 2017:105). Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah, yang berarti semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan sedikitnya temuan maka semakin baik juga kinerja pemerintah daerah tersebut (Saputra, 2018:7). Berdasarkan teori dan hasil temuan diatas dapat dibuat hipotesis awal sebagai berikut;

H6: Diduga Sistem Pengendalian Internal memoderasi atau berpengaruh positif terhadap kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Analisis

Metode analisis data untuk mengolah data adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu *IBM SPSS 21 for Windows.*

**a. Analisis Data Deskriptif**

Analisis data deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Untari, 2018:47). Statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran tentang demografi responden dan deskripsi disetiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

**b. Uji Kualitas Data**

**1) Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel penelitian yang ditetapkan (Hutahayan, 2019:114).

**2) Uji Reabilitas**

Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equevalent, dan gabungan keduanya. Reabilitas kuesioner diuji dengan metode internal konsistensi, dilakukan dengan menghitung koefisien *Alpha Cronbach*. Instrument penelitian berupa kuesioner setiap variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai $\propto \geq$ 0.06 (Hutahayan, 2019:115).

**c. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinari

least square (OLS).

**1) Uji Normalitas**

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai rasidual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal secara normal atau tidak (Purnomo, 2017:108).

**2) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Ansofino, et al. 2016:94).

**3) Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari rasidual satu ke pengamatan yang lain (Ansofino, et al. 2016:94).

**d. Uji Hipotesis**

**1) Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi Linear Berganda merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana, ketika regresi linear sederhana hanya menyediakan satu variabel independen (x) dan satu juga variabel dependen (y) (Kurniawan & Yuniarto, 2016:91). Rumus yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

$$\boldsymbol{Y = a + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + e}$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan
α = Konstanta
X1 = Desentralisasi Fiskal
X2 = Transparansi
X3 = Kinerja
β 1-β 3 = Koefisien regresi berganda
e = error term

**2) Analisis Regresi Moderasi**

Analisis variabel moderasi merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Variabel moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah variabel predikator atau penjelas (independent) terhadap variabel responden atau tergantung (dependent) (Solimun, Fernandes, & Nurjannah, 2017:79-81). Ada 3 metode analisis regresi linear dengan variabel moderasi yaitu:

1) Uji Interaksi (Moderated Regression Analysis)
2) Uji Selisih Mutlak
3) Uji Rasidual

*Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur ineteraksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009:93). *Moderated Regression Analysis* (MRA) berbeda dengan analisis sub-kelompok, karena menggunakan pendekatan yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi (Ghozali, 2013:229). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, Variabel bebas adalah desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja, sedangkan variabel terikat adalah akuntabilitas laporan keuangan. Uji interaksi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = a + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + \beta 4 X4 + \beta 5 X1 * X4 + \beta 6 X2 * X4 + \beta 7 X3 * X4 + e}$$

- Y= Akuntabilitas Laporan Keuangan
- $X_1$= Desentralisasi Fiskal
- $X_2$= Transparansi
- $X_3$= Kinerja
- $X_4$= Sistem Pengendalian Internal
- $X_1$*$X_4$= Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
- perbedaan antara $X_1$ dan $X_4$
- $X_2$*$X_4$= Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
- perbedaan antara $X_2$ dan $X_4$
- $X_3$*$X_4$= Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara $X_3$ dan $X_4$
- α= Kostanta
- $\beta$= Koefisien Regresi
- e= Error Term

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji

koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test):

**1) Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi dilambangka dengan $r^2$ dan umumnya dinyatakan alam persentase (%). Koefisien determinasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen (x) terhadap variasi (naik/turunnya) variabel dependen (y). Dengan kata lain, variabel y dapat dijelaskan oleh variabel x sebesar $r^2$ % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain (Kurniawan & Yuniarto, 2016:45).

**2) Uji Regresi Secara Persial**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara persial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara persial mempengaruhi variabel dependen (Mulyono, 2018:113). Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0{,}05$:

- Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak
- Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima
- Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Hipotesis ($H_1$) yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Akan tetapi hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien unstandardized beta 0,166 dan nilai signifikan 0,667. Artinya hasil analisis desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan oleh karena itu hipotesis pertama ditolak. Artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu daerah untuk memiliki akuntabilitas laporan keuangan, namun peningkatannya tidak signifikan.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability)* dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat (Pamungkas, 2013:28). Dapat disimpulkan, Desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntablitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah (Fontanella & Rosietta, 2014:15).

Desentralisasi dapat mengingkatkan kualitas pengembilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan kondisi lokal. Pemerintah daerah harus memperkuat tanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah. Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar (2016) dan Muraiya dan Nadirsyah (2018) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

### 4.2 Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Hipotesis ($H_2$) yang diajukan dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan oleh karena itu hipotesis

kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan transparansi meningkat, maka akuntabiltas laporan keuangannya ikut meningkat.

Dari hasil penelitian tentang transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa transparansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng perlu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Karena transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak akan terpenuhi rencana dan target yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah sistem pertanggungjawaban laporan keuangan tidak akan terwujud. Karena transparansi adalah salah satu faktor utama agar meningkatkan pengelolaan keuangan.

Transparansi adalah salah satu prinsip internal pengelolaan keuangan daerah, yang akan meningkatkan pengelolaan keuangan dan perspektif penerapan transparansi, penerapan prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah akan mampu memenuhi keinginan masyarakat dan akan mendorong peran masyarakat dalam manajemen pembiayaan daerah sehingga kedepannya akan menimbulkan kemajuan daerah dan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Ananda F. P., 2018) yang mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

### 4.3 Pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Hipotesis ($H_3$) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan oleh karena itu hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan tentang kinerja meningkat maka semakin meningkat pula akuntabilitas laporan keuangannya.

Hasil penelitian pada pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan bersifat positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut memiliki tanggung jawab pelaporan keuangan yang tinggi. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan (Mudhofar & Tahar, 2016:178). Saat kinerja pemerintah daerah baik maka ada kecenderungan untuk menyediakan akuntabilitas yang baik.

Manajemen kinerja yang baik menggambarkan arah SKPD menuju tata kelola yang baik. Artinya semakin baik kinerja pemerintah maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, bisa juga terkait dengan upaya menyampaikan pesan positif (Mengonfirmasikan kepada pemangku kepentingan bahwa pemerintah daerah berkinerja baik, agar dapat ditampilakan dalam bentuk pertanggung jawaban yang baik.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar (2016) yang mengatakan bahwa kinerja berpengaruh positif terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan berbanding terbalik dengan penelitian purbasari dan bawono (2017) yang mengatakan bahwa kinerja tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

### 4.4 Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi (MRA) dinyatakan bahwa sistem pengendalian internal bukan merupakan variabel moderasi dan juga merupakan variabel yang dapat memperlemah hubungan antara desentralisasi fiskal dan akuntabilitas

laporan keuangan, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Desentralisasi fiskal harus memberikan peluang bagi daerah untuk menerima dana pemerintah daerah agar mendapat rasa tanggung jawab yang baik. Untuk mendapatkan akuntbilitias laporan diperlukan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal itu sendiri menjadi proses yang sangat diperlukan dalam tindakan dan aktivitas yang sedang berlangsung secara terus menerus memberikan jaminan yang memadai oleh pemimpin dan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan pengaman aset milik negara dan kepatuhan.

Sistem pengendalian internal sepenuhnya diterapkan dilingkungan pemerintahan pusat dan daerah bertujuan untuk memberikan kepercayaan yang memadai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi akuntabilitas laporan keuangan.

### 4.5 Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi (MRA) Menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern bukan merupakan variabel yang moderat, atau memperlemah hubungan antara transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan, sehingga hipotesis kelima ditolak.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Yustisia, 2007:28). Bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah sepertinya surat kabar dan internet. Transparansi adalah salah satu prinsip internal pengelolaan keuangan daerah, yang akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka penerapan prinsip ini sangat penting.

Itu bisa dilihat dari rilis laporan keuangan Pemerintah daerah sepertinya tidak punya Menjadi hal biasa. Transparansi adalah salah satu prinsip internal Pengelolaan keuangan daerah, yang akan meningkatkan pengelolaan keuangan Domain, maka penerapan prinsip ini sangatlah penting

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang terkait harus memberikan semua informasi pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya kepada publik karena hal-hal tertentu.

### 4.6 Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi (MRA) terbukti bahwa sistem pengendalian internal merupakan variabel moderasi, atau variabel yang dapat memperkuat hubungan antara kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan, maka hipotesis keenam dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan interaksi sistem pengendalian internal dan kinerja yang dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Yang artinya jika kinerja mengalami peningkatan maka akuntabilitas juga harus meningkat, dan ditambah sistem pengendalian internal antara tata kelola, maka sistem pengendalian internal dan kinerja harus menjadi lebih kuat. Tentang ketergantungan pemerintah pusat pada kinerja terdapat efek moderasi dari sistem pengendalian internal. Karena Kinerja diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas yang lebih baik ketika badan tersebut mendapatkan kendali dari pemerintah pusat.

Ukuran kinerja juga bisa menentukan pencapaian kinerja organisasi sebagai alat pemantau dan evaluasi untuk mendapatkan informasi yang berguna dengan

peningkatan pelayanan. Hal ini karena kinerja untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik ketika suatu instansi mendapatkan pengendalian dari pemerintah pusat. Dalam hubungan pemerintah pusat pada kinerja peran moderasi dari unsur sistem pengendalian internal.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya saat ketergantungan pada pemerintah meningkat maka kemungkinan suatu daerah untuk memiliki akuntabilitas laporan keuangan juga meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya saat transparansi dan kinerja meningkat maka akuntabilitas laporan keuangan juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis (MRA) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bukan variabel moderasi antara desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya hipotesis yang diajukan ditolak. Sedangkan sistem pengendalian internal merupakan variabel moderasi antara kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya hipotesis yang diajukan diterima.

### 5.2 Saran

a. Bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya kecurangan.
b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mampu meningkatkan transparansi agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diharapkan dan masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi.
c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dengan menambah variabel atau indikator lain yang akuntabilitas laporan mempengaruhi keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan.* Malang: UB Press.

Ananda, F. P. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian internal sebagai Variabel Moderasi.

Angrainai, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.

Fontanella, A., & Rosietta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilits Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Undip.

Hall, J. A. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4 Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat.

Hamsinar. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi.

Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban.* Yogyakarta: Percetakan Deepublish.

Haryatmoko. (2011). *Etika Publik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen.* Jakarta: Kencana.

Hutahayan, B. (2019). *Peran Kepemimpinan Spiritual dan Media Sosial pada Rohani Pemuda.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Imbarudin, A. (2019). *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Iwan, H. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Metode.* Kuningan : Hidayatul Quran Kuningan.

Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sekto Publik.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Kurniawan, A. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan.

Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Analisi Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R.* Jakarta: Kencana.

Kurniawan, T. A. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Liana, L. (2009). penggunaa MRA dengan Spss untuk menguji pengaruh variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen .

Lubis, Z., Manaf, A. H., Abudulla, M. S., & Juno, M. Z. (2019). *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial.* Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Disentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2,.*

Mulyani, S., Suzan, L., Sagara, Y., Yuniarti, E., Karya, c. D., Azizah, Z. N., & Alam, M. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi di Sektor Publik.* Bandung: Unpad press.

Mulyanto, Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variab.

Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu.* Yogyakarta : CV. Budi Utama.

Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisien dan Efektifitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 2, (2018) Halaman 236-253*.

Pamungkas, B. (2013). *Daerah, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah.* Jawa Barat.

Purbasari, H., & Bawono, A. D. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

Purnomo, R. a. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS.* Ponorogo: CV. Wade Group.

Purwani, T., & Nurcholis, L. (2019). *Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasokan.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Perintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*.

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitia kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik Pendidikan dan Ekperiment.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Sanica, I. G., Ayu, P. C., & Suidarma, I. M. (2019). *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak JatiliwihTabanan Bali.* Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.

Saputra, A. E. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dengan Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening.

Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butabutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., . . . Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan.* Goronalo: Ideas Publishing.

Sawarjuwono, T. (2012). *Aspek Perilaku Manusia Dalam Dunia Akuntansi.* Surabaya: Airlangga University Press AUP.

sellang, K., Jamaluddin, & Munatsir, A. (2019). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya.* Qiara Media.

Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Siahaan, N. R. (2016). Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Depok: Raih Asa Sukses.

Solimun, Fernandes, A. A., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS.* Malang: UB Press.

Suacana, I. W. (2020). *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris Bagi Bagi Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Kota Induk Provinsi Papua.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Timotius, E. (2019). *Intrapreneurial Mindset Strategi Pemberdayaan Karyawan Dalam Bisnis Di Era Disruptif.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh.

Untari, D. T. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN: Penelitian Kontenporer Bidang Ekonomi dan Bisnis.* Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

Widilestariningtyas, O., & Permana, I. (2011). Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Witjaksosno, B. (2020). *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah.* Jakarta Selatan: Loka Media.

Yuliani, I. (2018). *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Yustisia, P. (2007). *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan.* Yogyakarta: PT. Buku Kita.

Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematiak, Dan Dinamika Perekonomian, Dan Kebijakan Publik.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.